LAPORAN RINGKAS HASIL KETERLIBATAN PPDI
DALAM FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) KAJIAN AKADEMIS
PENGEMBANGAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG BERKELANJUTAN (BLB)

I. Informasi Kegiatan

Kegiatan	: Focus Group Discussion (FGD) Lintas-Aktor untuk Penguatan Kajian Akademis Bantuan Langsung Berkelanjutan (BLB)
Penyelenggara	: Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) bekerja sama dengan The PRAKARSA
Waktu	: Rabu, 22 April 2026
Tempat	: Sentra Terpadu Pangudi Luhur
Kelompok Diskusi	: Kelompok 1
Peserta Kelompok I	: PPDI, Alzheimer Indonesia, DILANS Indonesia, KND, PERGEMI, PKH Kemensos

II. Latar Belakang Diskusi

FGD ini diselenggarakan sebagai bagian dari proses penyusunan **kajian akademis pengembangan skema Bantuan Langsung Berkelanjutan (BLB)** yang ditujukan bagi kelompok rentan seperti **lansia tunggal dan penyandang disabilitas dengan kebutuhan dukungan tinggi**.

Program BLB dirancang sebagai penguatan sistem perlindungan sosial yang tidak hanya berorientasi pada kemiskinan, tetapi juga pada **kerentanan struktural dan kebutuhan dukungan jangka panjang**, khususnya bagi kelompok yang tidak lagi memiliki kapasitas produktif.

Dalam forum ini, PPDI turut berkontribusi memberikan pandangan dan masukan berbasis pengalaman organisasi dalam advokasi hak penyandang disabilitas di tingkat nasional maupun daerah.

III. Pokok-Pokok Pandangan dan Usulan PPDI

Pada sesi diskusi awal, PPDI menyampaikan beberapa gagasan strategis yang dinilai penting untuk memperkuat desain kebijakan BLB agar lebih inklusif dan tepat sasaran.

1. Bantuan sebagai Hak Sosial Permanen

PPDI mengusulkan agar skema BLB dirancang sebagai **jaminan sosial yang bersifat permanen (entitlement)**, bukan sekadar program bantuan yang bersifat proyek atau temporer.

Pendekatan ini penting karena lansia tunggal dan penyandang disabilitas dengan kebutuhan dukungan tinggi merupakan kelompok yang **tidak mengalami “graduasi” dari kondisi kerentanan**, sehingga memerlukan jaminan sosial yang berkelanjutan sepanjang hidupnya.

2. Bantuan Berbasis Kebutuhan Riil Disabilitas

PPDI menekankan bahwa perhitungan bantuan sebaiknya mempertimbangkan **extra cost of disability**, yaitu biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh penyandang disabilitas untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

Biaya tambahan tersebut dapat mencakup:

- kebutuhan alat bantu
- transportasi khusus
- terapi dan rehabilitasi
- perawatan kesehatan tambahan
- dukungan caregiver

Dengan pendekatan ini, bantuan yang diberikan tidak hanya didasarkan pada status kemiskinan, tetapi juga pada **kebutuhan spesifik yang timbul akibat kondisi disabilitas**.

3. Sistem Data Disabilitas Nasional Terpadu

PPDI menyoroti pentingnya membangun **Sistem Data Disabilitas Nasional Terpadu** yang mampu mengintegrasikan berbagai sumber data yang saat ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.

Sistem ini diharapkan mampu:

- meningkatkan akurasi pendataan
- mengurangi duplikasi data
- memudahkan integrasi program bantuan lintas sektor
- memastikan bantuan tepat sasaran.

4. Bantuan Tidak Hanya Tunai

PPDI juga menekankan bahwa bantuan bagi penyandang disabilitas tidak cukup hanya berupa **bantuan langsung tunai (cash transfer)**.

Program BLB perlu mengembangkan **skema dukungan hybrid**, yang mencakup layanan sosial berbasis kebutuhan, antara lain:

- layanan **homecare** atau perawatan di rumah
- layanan **transportasi darurat seperti ambulans yang dapat diakses kapan saja**
- dukungan alat bantu
- dukungan caregiver.

Dalam praktik di daerah, PPDI menemukan bahwa fasilitas seperti **ambulans desa sering kali tidak mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan**, karena dalam beberapa kasus penggunaannya lebih banyak dimanfaatkan oleh aparat desa atau keluarga tertentu. Hal ini menunjukkan perlunya sistem layanan yang lebih akuntabel dan berbasis kebutuhan penerima manfaat.

IV. Tanggapan PPDI atas Pertanyaan Moderator

Menjelang sesi istirahat, moderator meminta peserta merumuskan pandangan terkait tiga isu kunci. PPDI memberikan tanggapan sebagai berikut.

1. Transisi dari PKH ke BLB

PPDI menekankan bahwa proses transisi dari Program Keluarga Harapan (PKH) ke BLB harus berprinsip:

“No Benefit Loss”

Artinya, apabila seorang lansia tunggal atau penyandang disabilitas telah teridentifikasi sebagai penerima manfaat BLB, maka **manfaat PKH yang sebelumnya diterima tidak boleh dihentikan terlebih dahulu** sampai yang bersangkutan benar-benar telah menerima manfaat BLB.

Pendekatan ini penting untuk mencegah **kekosongan bantuan (benefit gap)** yang dapat memperburuk kondisi kerentanan penerima manfaat.

2. Arsitektur Integrasi Enam Pilar BLB

PPDI mengusulkan agar enam pilar dukungan BLB (misalnya makanan, caregiver, kesehatan, alat bantu, layanan sosial, dan dukungan pemakaman) diintegrasikan melalui **pendekatan berbasis komunitas**.

Pendekatan komunitas dinilai lebih realistis mengingat keterbatasan kapasitas pemerintah dalam menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara langsung.

Melalui pendekatan ini, dukungan dapat diperkuat dengan melibatkan:

- organisasi masyarakat
- jaringan komunitas disabilitas
- kader sosial di tingkat lokal.

3. Peran Kementerian/Lembaga Lain

PPDI mengusulkan agar program BLB tidak hanya menjadi tanggung jawab satu kementerian saja.

Salah satu contoh yang disampaikan adalah peran **Kementerian Desa**, yang dapat:

- mengalokasikan **Dana Desa** untuk mendukung layanan bagi lansia dan penyandang disabilitas
- membiayai program perawatan komunitas
- mendukung operasional caregiver atau layanan sosial di desa.

Pendekatan lintas sektor ini dinilai penting agar BLB dapat berjalan secara **berkelanjutan dan terintegrasi**.

V. Catatan Kritis Tambahan dari PPDI

Selain poin utama di atas, PPDI juga menyampaikan beberapa catatan penting berdasarkan pengalaman di lapangan.

1. Permasalahan Pendataan

PPDI menyoroti bahwa sistem pendataan saat ini masih menghadapi banyak persoalan validitas.

Contoh temuan di lapangan menunjukkan adanya data bantuan sosial dengan **alamat yang tidak jelas**, bahkan tercatat tanpa informasi RT/RW yang valid.

Selain itu, terdapat indikasi praktik manipulasi data, misalnya:

- keluarga aparat desa atau pengurus wilayah menjadi prioritas penerima bantuan
- perubahan desil data untuk memprioritaskan kelompok tertentu.

Situasi ini menunjukkan perlunya **perbaikan sistem verifikasi dan validasi data secara lebih ketat dan transparan**.

2. Peran Caregiver

PPDI menekankan bahwa caregiver dalam program BLB tidak hanya menjalankan fungsi teknis perawatan.

Seorang caregiver juga diharapkan:

- memiliki empati dan kepedulian
- mampu menjadi pendengar bagi penerima manfaat
- memiliki kompetensi teknis dan sertifikasi
- bekerja dengan pendekatan yang berorientasi pada martabat manusia.

Dengan demikian, caregiver diharapkan mampu memberikan dukungan yang tidak hanya bersifat fisik tetapi juga **psikososial**.

3. Kejelasan Definisi Sasaran Program

PPDI juga menyoroti pentingnya memperjelas definisi operasional mengenai:

- **lansia tunggal**
- **penyandang disabilitas berat**

Definisi yang tidak jelas berpotensi menimbulkan kerancuan bagi petugas pendataan di lapangan dan menyebabkan kesalahan dalam penentuan sasaran program.

4. Pelibatan Kader RBM

PPDI mengusulkan agar program BLB melibatkan **kader Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)** sebagai bagian dari sistem caregiver.

Kader RBM dinilai memiliki keunggulan karena:

- telah memiliki pengalaman bekerja dengan penyandang disabilitas

- memahami kebutuhan komunitas lokal
- dalam banyak kasus telah memiliki kemampuan dasar terapi dan rehabilitasi.

Pelibatan kader RBM dapat membantu memperkuat implementasi program secara lebih efektif di tingkat komunitas.

VI. Penutup

Partisipasi PPDI dalam FGD ini merupakan bentuk kontribusi organisasi dalam memastikan bahwa desain kebijakan Bantuan Langsung Berkelanjutan (BLB) benar-benar **inklusif, berbasis kebutuhan nyata, serta menghormati hak penyandang disabilitas dan lansia**.

Berbagai masukan yang disampaikan oleh PPDI diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kajian akademis dan desain kebijakan BLB agar program tersebut mampu memberikan perlindungan sosial yang **adil, berkelanjutan, dan tepat sasaran**.